

## DAFTAR PUSTAKA

- Boy Muhammad Putra, Ardiansah, & Bagio Kadaryanto. (2021). Tinjauan Normatif Penjualan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 2(1), 57–66.  
<https://doi.org/10.46730/japs.v2i1.41>
- Denpasar, D. I. K. (2021). TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI TERKAIT PELAKU USAHA PERTAMINI Abstrak, 2(2), 429–433.
- HADIBRATA, B. (2019). PENYALAHGUNAAN NIAGA BBM OLEH SPBU MENURUT UU NO. 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI JO. UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. *Jurnal LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Helmi. (2019). Documenting Legal Protection Of Indigenous Forests In Realizing Indigenous Legal Community Rights In Jambi Province. *Library Philosophy and Practice (e-Journal)*.
- Howell, A., & Monique, F. (1967). 済無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 92–101.
- Internasional, K. S. (1945). No  
主観的健康感を中心とした在宅高齢者における  
健康関連指標に関する共分散構造分析Title, 2(1), 73–80.
- Lioty, R. R. (2017). Penanganan Illegal Tapping, Illegal Drilling dan

Penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Indonesia Tahun

2011-2015”, *Vol. 3, No.* Retrieved from <http://ejournal->

[s1.undip.ac.id/index.php/jihi](http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi)

MAMONTO, E. E. P. (2018). PERAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BBM BERSUBSIDI DI WILAYAH HUKUM POLRES GORONTALO KOTA. *Jurnal PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BBM.*

Maria, E., & Nainggolan, N. (1995). PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA ( STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA BATAM ) IMigas. (2005). *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*. Jakarta: BPH MIGAS RI.

MOCH.FAISAL SALAM, S.H., M. H. (2016). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek* (1st ed.). BANDUNG.

Monopoli, P., Persaingan, D. A. N., & Tidak, U. (1997). P.A.F. Lamintang, 33–68.

Mubarak, A. (n.d.). MENIMBUN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Oleh: Agus Mubarak □. *Jurnal Hukum Islam, Ihtikaar, Ta'ziir, Hak Kepemilikan*, 14–21.

Muladi. (2013). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*,. Semarang: badan penerbit UNDIP.

- NAKSIR SEMBIRING, S. (2013). ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN PONTIANAK NOMOR 11/PID.SUS/TP.KORUPSI/2013/PN.PTK DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL KONI PROVINSI KALIMANTAN BARAT, *1*, 1–5.
- PANJAITAN, I. (2006). *PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI JENIS SOLAR*. *jurnal PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI JENIS SOLAR* (Vol. 53).  
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Prihatmaja, M. R. R., Hafrida, H., & Munandar, T. I. (2021). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, *2*(1), 57–72.  
<https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12647>
- Prodjodikkono, W. (2006). *asas-asas hukum pidana*. BANDUNG: refika aditama.
- R.Abdoel Djamali, S, H. (n.d.). *pengantar hukum indonesia* (EDISI REVI). BANDUNG.
- Susilo, S. (2013). *Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia*. YOGYAKARTA: pustaka baru.
- Syarifin, P. (2000). *hukum pidana indonesia*. BANDUNG: bustaka setia.
- Undang-undang. (2001). UU nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, *4*, 1–6.
- Wola, M. G. (2016). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL BAHAN

BAKAR MINYAK TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR  
22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI. *Sisi Lain*  
*Realita*, 1(1), 84. [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.vol1\(1\).1407](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.vol1(1).1407)